

**LAPORAN PEMANFAATAN
KEANGGOTAAN INDONESIA PADA**

ASEAN SUPREME AUDIT INSTITUTIONS (ASEANSAI)

UNTUK TAHUN 2025



**BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

JANUARI 2026

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
BAB I KEANGGOTAAN DAN KONTRIBUSI INDONESIA DI ASEANSI	1
BAB II PEMANFAATAN KEANGGOTAAN ASEANSI	2
1. MANFAAT KUALITATIF	2
1.1. Fungsi Pengembangan Jaringan dan Relasi Internasional	4
1.2. Fungsi Peningkatan Kapasitas dan Pertukaran Pengetahuan	6
1.3. Fungsi Lainnya	8
2. MANFAAT KUANTITATIF	8
2.1. Kerja Sama Teknik	8
2.2. Partisipasi Kegiatan Internasional	9
2.3. Jumlah dan/atau Nilai Bantuan	11
2.4. Jumlah Warga Negara Indonesia yang Bekerja pada OI	11
3. UPAYA MENEKAN KONTRIBUSI	11
4. KINERJA OI YANG BERLOKASI DI INDONESIA	12
5. PERAN PENTING INDONESIA DI ASEANSI	14
6. RENCANA INDONESIA DALAM KEANGGOTAAN ASEANSI 2026	15
BAB III <i>SELF ASSESSMENT</i>	16
BAB IV SARAN DAN KENDALA	17

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini mengevaluasi keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada ASEAN *Supreme Audit Institutions* (ASEANSAI) sepanjang tahun 2025, dengan menekankan peran strategis BPK sebagai salah satu penggagas sekaligus Sekretariat ASEANSAI sejak pendiriannya pada 2011. Keanggotaan tersebut memberikan manfaat yang signifikan bagi Indonesia, baik dari aspek kualitatif maupun kuantitatif.

Secara kualitatif, BPK berkontribusi dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan reputasi dan kredibilitas Indonesia di tingkat internasional, serta dukungan terhadap diplomasi regional dan integrasi sosial budaya. Sementara itu, secara kuantitatif, BPK juga menunjukkan partisipasi aktif dalam berbagai pelatihan, lokakarya (*workshop*), bertukar pengalaman (*knowledge sharing*) dan kerja sama teknik, yang diantaranya didukung oleh mitra internasional, antara lain *Swedish National Audit Office* (Swedish NAO).

Dalam kapasitas sebagai Sekretariat ASEANSAI, BPK berperan mengoordinasikan kegiatan operasional organisasi, mengelola hubungan dengan mitra strategis serta mendukung kelancaran pelaksanaan program dan inisiatif ASEANSAI. Selain itu, BPK turut berperan dalam memfasilitasi pertukaran pengetahuan sebagai anggota ASEANSAI *Knowledge Sharing Committee*, mendukung peningkatan kapasitas melalui keanggotaannya dalam *Training Committee*, serta berkontribusi dalam penetapan arah dan prioritas strategis organisasi sebagai anggota *Strategic Planning Committee*.

Sepanjang tahun 2025, berbagai capaian berhasil diraih, antara lain pelaksanaan program peningkatan kapasitas dan penguatan kerja sama internasional yang signifikan. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan pengelolaan anggaran, kompleksitas koordinasi lintas negara, serta kebutuhan akan inovasi dan pengembangan program yang berkelanjutan.

Dalam rangka mengoptimalkan manfaat keanggotaan Indonesia dalam ASEANSAI ke depan, BPK dipandang perlu untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia, memperluas kemitraan strategis dengan mitra strategis dan pemangku kepentingan lainnya, serta merumuskan program kerja yang adaptif terhadap isu-isu strategis dan tantangan audit sektor publik yang terus berkembang.

Dengan investasi tahunan sebesar USD700, keanggotaan BPK dalam ASEANSAI terbukti memberikan nilai tambah yang signifikan dalam mendukung peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta sejalan dengan pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

BAB I

KEANGGOTAAN DAN KONTRIBUSI INDONESIA DI ASEANSI

ASEAN *Supreme Audit Institutions* (ASEANSI) lahir dari gagasan mengenai pentingnya peran lembaga pemeriksa keuangan negara di kawasan Asia Tenggara dalam mendukung penguatan tata kelola sektor publik. Organisasi ini dibentuk sebagai entitas yang independen dan profesional, serta terakreditasi sebagai organisasi regional ASEAN. ASEAN sendiri telah berdiri sejak tahun 1967 sebagai organisasi kawasan yang menaungi negara-negara Asia Tenggara dengan kesamaan karakteristik budaya, kebutuhan, dan tantangan pembangunan.

Meskipun ASEAN telah menjalankan berbagai program kerja yang memberikan manfaat bagi negara anggotanya, peran dan kontribusi lembaga pemeriksa keuangan negara belum terwadahi secara terstruktur dalam kerangka kerja sama regional. Berdasarkan kondisi tersebut, lembaga pemeriksa keuangan negara-negara ASEAN berinisiatif membentuk suatu organisasi regional guna memperkuat pengembangan audit sektor publik, dengan harapan dapat mendukung pencapaian tujuan ASEAN serta meningkatkan kapasitas kelembagaan masing-masing negara anggota.

Setelah melalui proses persiapan dan serangkaian pembahasan di tingkat pimpinan lembaga pemeriksa keuangan negara anggota ASEAN, ASEANSI secara resmi didirikan pada tanggal 16 November 2011. BPK merupakan salah satu inisiator utama dan memimpin proses pembentukan organisasi tersebut. Indonesia juga menjadi tuan rumah pelaksanaan ASEANSI *Assembly* pertama (1st ASEANSI *Assembly*) sebagai forum tertinggi organisasi, yang diselenggarakan bersamaan dengan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-18, pada saat Indonesia menjabat sebagai Ketua ASEAN.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua dari sepuluh Lembaga Pemeriksa atau *Supreme Audit Institutions* (SAI) negara anggota ASEAN hadir dan menandatangani *Agreement* pembentukan ASEANSI sebagai bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kapasitas dan memperkuat kerja sama di bidang pemeriksaan sektor publik di kawasan ASEAN. Selain itu, pembentukan ASEANSI diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung pembentukan ASEAN *Community* pada tahun 2015.

Keanggotaan BPK dalam ASEANSI secara resmi disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada *The Association of Southeast Asian Nations Supreme Audit Institutions*, yang ditetapkan pada tanggal 3 September 2012. Selanjutnya, pada tanggal 6 Februari 2013, ASEANSI memperoleh status sebagai *Associated Entity of ASEAN* dalam kategori “*Other Stakeholders*” sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Piagam ASEAN, berdasarkan keputusan *Committee of Permanent Representatives* (CPR) ASEAN. Dengan status tersebut, ASEANSI merupakan entitas yang berasosiasi dengan ASEAN namun bukan merupakan organ ASEAN.

Keanggotaan BPK dalam ASEANSI berlanjut hingga tahun 2025, sejalan dengan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional. Pasal 1 Keputusan Presiden tersebut menetapkan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan dimaksud, dimana ASEANSI tercantum sebagai salah satu organisasi internasional yang diikuti oleh Indonesia.

Dalam keanggotaannya pada ASEANSI, Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi iuran tahunan yang dibayarkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat (USD). Ketentuan tersebut diatur dalam ASEANSI *Rules and Procedures*, Chapter 11 tentang *Financial Rules and Procedures*, paragraf 11.2.1, yang menyatakan bahwa setiap anggota ASEANSI wajib membayar

Annual Contribution sebesar USD700 atau sejumlah lain sebagaimana ditetapkan oleh *Assembly* sejak tahun 2013. Dengan demikian, Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar *Annual Contribution* kepada ASEANSAI sebesar USD700 setiap tahunnya.

BAB II

PEMANFAATAN KEANGGOTAAN ASEANSAI

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional, Pasal 2 ayat (1), keanggotaan dan kontribusi Indonesia dalam organisasi internasional bertujuan untuk meningkatkan

1. Peran dan kinerja Indonesia di forum internasional,
2. Hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain, dan
3. Kepercayaan masyarakat internasional.

Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), keanggotaan dan kontribusi tersebut diabdikan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, BPK berupaya mengoptimalkan pemanfaatan keanggotaan Indonesia dalam ASEANSAI agar investasi kontribusi keanggotaan dapat dimanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Upaya ini dilakukan melalui partisipasi aktif dalam berbagai forum, kegiatan, dan mekanisme kerja sama ASEANSAI yang relevan dengan mandat dan fungsi BPK.

Keanggotaan BPK dalam ASEANSAI merupakan langkah strategis yang dirancang untuk memberikan manfaat yang signifikan, tidak hanya bagi BPK sebagai institusi, tetapi juga bagi negara-negara anggota ASEAN secara keseluruhan. Secara khusus, pemanfaatan keanggotaan ini diarahkan untuk memberikan nilai tambah pada tingkat institusional dan profesional bagi BPK, serta meningkatkan visibilitas dan eksposur negara-negara ASEAN di tingkat internasional melalui penguatan peran ASEANSAI sebagai organisasi regional lembaga pemeriksa keuangan.

Dalam kerangka tersebut, BPK bersama lembaga pemeriksa keuangan negara-negara anggota ASEAN berupaya meningkatkan kompetensi organisasi dan para pemeriksa, sekaligus memperkuat solidaritas dan kolektivitas melalui semangat *togetherness* dan prinsip *no one left behind*. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat menciptakan *leveraging effect* yang lebih besar dalam memperkuat kepemimpinan dan posisi ASEAN di tingkat internasional.

Pemanfaatan keanggotaan BPK dalam ASEANSAI juga diwujudkan melalui keikutsertaan aktif dalam forum profesional di bidang pemeriksaan sektor publik di tingkat regional. Melalui kerja sama, pertukaran pengetahuan, dan program pengembangan kapasitas, Indonesia berupaya memperoleh manfaat institusional dan profesional yang berkontribusi pada peningkatan kualitas pemeriksaan sektor publik dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Selain itu, BPK terus mendorong kontribusi aktif Indonesia dalam berbagai kegiatan internasional dan bentuk kerja sama lainnya di bawah kerangka ASEANSAI. Peran aktif tersebut diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam memperkuat kepercayaan internasional, serta memberikan kontribusi positif terhadap penguatan kepemimpinan Indonesia dalam komunitas global.

Secara keseluruhan, pemanfaatan keanggotaan Indonesia dalam ASEANSAI diharapkan mampu menempatkan Indonesia sebagai salah satu aktor utama dalam kancah internasional serta berkontribusi pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

1. MANFAAT KUALITATIF

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional, Pasal 4 ayat (2), mengatur bahwa manfaat kualitatif keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional dapat mencakup aspek ideologi; politik; ekonomi dan pembangunan; sosial budaya; perdamaian dan keamanan internasional; kemanusiaan; lingkungan hidup; dan/atau manfaat lainnya.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, keanggotaan Indonesia dalam ASEAN *Supreme Audit Institutions* (ASEANSAI) dimanfaatkan secara optimal untuk memperoleh berbagai manfaat kualitatif melalui sejumlah aspek strategis sebagai berikut.

a. Ideologi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Keanggotaan BPK dalam ASEANSAI memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai ideologis, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan sektor publik. Melalui kerja sama dan kolaborasi regional, BPK berperan sebagai *driving force* dalam mendorong adopsi dan diseminasi praktik terbaik (*best practices*) tata kelola pemerintahan yang baik di kawasan ASEAN, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dalam konteks hubungan regional.

b. Politik dan Diplomasi Regional

Keikutsertaan BPK dalam ASEANSAI, khususnya dalam perannya sebagai salah satu pendiri dan Sekretariat, memberikan posisi strategis dalam diplomasi regional. Melalui kepemimpinan dan inisiatif dalam berbagai kegiatan ASEANSAI, dapat meningkatkan pengaruh Indonesia dalam proses pengambilan keputusan regional, memperluas jejaring profesional dan kelembagaan, serta memperkuat kepercayaan dan kerja sama antarnegara anggota ASEAN.

c. Ekonomi dan Efisiensi Pengelolaan Publik

ASEANSAI membuka peluang bagi BPK untuk berkontribusi dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya publik melalui kerja sama teknis, pelaksanaan *research projects*, pertukaran pengetahuan, dan program pelatihan. Upaya ini diharapkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan, memperkuat stabilitas fiskal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di kawasan ASEAN.

d. Sosial budaya dan kolektivitas

Pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik antarnegara anggota ASEANSAI tidak hanya meningkatkan kapasitas kelembagaan lembaga pemeriksa keuangan (*institutional level*), tetapi juga kompetensi para pemeriksa (*professional level*), sekaligus mempererat hubungan antarnegara (*regional level*). Proses ini memperkuat semangat kebersamaan, saling mendukung, dan kolektivitas, yang pada akhirnya mendorong integrasi sosial budaya yang lebih erat di kawasan ASEAN.

e. Peningkatan citra dan eksposur internasional

Partisipasi aktif BPK dalam ASEANSAI memberikan peluang yang lebih luas bagi Indonesia untuk berperan dalam forum profesional internasional di bidang pemeriksaan sektor publik. Keterlibatan tersebut mencerminkan kepemimpinan Indonesia dalam tata kelola sektor publik, meningkatkan visibilitas dan eksposur di tingkat global, serta memperkuat kepercayaan internasional terhadap kapasitas Indonesia dalam memainkan peran strategis dalam komunitas global.

f. Optimalisasi Peluang Kerja Sama Strategis

Berbagai manfaat kualitatif tersebut dicapai melalui optimalisasi peluang kerja sama strategis serta pendekatan proaktif dalam memanfaatkan kolaborasi yang terjalin, baik di tingkat regional maupun internasional. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan, memperluas jejaring kemitraan, serta mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi dan kepentingan nasional Indonesia.

Dalam konteks keanggotaan BPK dalam ASEANSAI, pemanfaatan keanggotaan dioptimalkan melalui pelaksanaan fungsi Sekretariat dan komite ASEANSAI. Pelaksanaan fungsi tersebut ditujukan untuk memperkuat sinergi antaranggota, memperluas jejaring kerja sama

internasional, mendorong pertukaran pengetahuan, serta mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.1. Fungsi pengembangan jaringan dan relasi internasional

Keanggotaan BPK dalam ASEANSAI merupakan bagian dari implementasi kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Melalui partisipasi aktif dalam forum ASEANSAI, BPK berperan dalam mempererat hubungan kerja sama dengan Supreme Audit Institutions (SAI) negara-negara anggota ASEAN, memperluas jejaring profesional dan kelembagaan, serta memperkuat posisi Indonesia di tingkat regional dan internasional.

- a. Partisipasi BPK sebagai ASEANSAI Sekretariat dalam *ASEAN Cybersecurity Training for IT Professionals* pada 19–23 Mei 2025 dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas dasar pengelolaan keamanan siber, khususnya dalam identifikasi risiko, penerapan kerangka kerja keamanan, dan respons insiden, juga mendukung ketahanan sistem TI.
- b. Partisipasi BPK dalam *50th ASEAN Audit Committee (AAC) Meeting* pada 13 Juni 2025 dimanfaatkan untuk berkontribusi dalam penguatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan ASEAN Sekretariat. Melalui keikutsertaan sebagai bagian dari delegasi Indonesia, BPK menyampaikan pandangan dan masukan substantif terhadap berbagai agenda strategis AAC, termasuk reviu Laporan Keuangan ASEAN Sekretariat Tahun 2024, tindak lanjut rekomendasi auditor eksternal, penguatan manajemen risiko, serta pembahasan *Terms of Reference* Auditor Eksternal. Partisipasi ini mencerminkan peran aktif Indonesia untuk dapat melibatkan kontribusi lembaga pemeriksa anggota ASEAN untuk mendukung tata kelola keuangan ASEAN yang independen dan sejalan dengan praktik pemeriksaan internasional.
- c. Partisipasi BPK dalam *9th Forum of Entities Associated with ASEAN* yang diselenggarakan pada 18 Juni 2025 memberikan kesempatan untuk BPK sebagai ASEANSAI Sekretariat membuka peluang mengeksplorasi kemungkinan berkolaborasi dengan para *associated entities* lainnya. Partisipasi dalam forum tersebut juga memungkinkan ASEANSAI untuk menyelaraskan agenda dengan isu-isu strategis ASEAN, antara lain *Inclusivity and Sustainability* serta *ASEAN Community Vision 2045*, melalui dialog dan diskusi lintas entitas yang difasilitasi oleh Sekretariat ASEAN.
- d. Partisipasi dalam peringatan *58th ASEAN Day* pada 8 Agustus 2025 dimanfaatkan untuk menegaskan komitmen dan kontribusi ASEANSAI dalam mendukung agenda ASEAN, khususnya penguatan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik sejalan dengan tema “*Resilient, Innovative, Dynamic, and People-Centred ASEAN*” serta *ASEAN Community Vision 2045*. Partisipasi ini juga digunakan sebagai sarana memperkuat jejaring dengan pemangku kepentingan ASEAN, termasuk peninjauan awal terkait keanggotaan SAI Timor Leste dan potensi kerja sama dengan mitra pembangunan.
- e. Partisipasi dalam *17th Coordinating Conference for the ASEAN Political-Security Community (ASCCO)* pada 22 Agustus 2025 dimanfaatkan untuk menyampaikan peran dan kontribusi ASEANSAI dalam mendukung pelaksanaan *End-Term Review ASEAN Political-Security Community (APSC) Blueprint 2025* serta memperkuat keterkaitan program ASEANSAI dengan agenda ASEAN menuju *ASEAN Community Vision 2045*.
- f. BPK memimpin pertemuan dalam *8th ASEANSAI Senior Officials’ Meeting (SOM)* pada 9–10 Juli 2025 di Manila sebagai forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan jejaring kelembagaan antar lembaga pemeriksa negara anggota ASEAN. Dalam kapasitas sebagai Sekretariat ASEANSAI, BPK memfasilitasi konsensus atas berbagai isu strategis

sekaligus mengoordinasikan transisi kepemimpinan dan persiapan menuju 8th ASEANSI Summit dalam *Pre-Handover ASEANSI Chairmanship Meeting*. Keterlibatan ini mencerminkan peran aktif BPK dalam memperkuat hubungan kerja sama regional dan memastikan kesinambungan tata kelola ASEANSI

- g. BPK sebagai Sekretariat ASEANSI memimpin pelaksanaan *Development-Partners Coordination Meeting* (DCM) pada 12 November 2025 sebagai forum strategis pertemuan para partner potensial ASEANSI untuk mengeksplorasi kemungkinan kerja sama, menyelaraskan prioritas kerja ASEANSI dengan dukungan para mitra pembangunan. Pertemuan ini dimanfaatkan untuk mengomunikasikan arah kebijakan dan kebutuhan program ASEANSI, mengoordinasikan potensi dukungan teknis dan pendanaan, serta memperkuat kemitraan guna memastikan keberlanjutan implementasi *work plan* ASEANSI secara terkoordinasi dan efektif.
- h. Partisipasi BPK dalam 8th ASEANSI Summit pada 13 November 2025 dimanfaatkan sebagai forum strategis untuk memperkuat jejaring kelembagaan dan posisi Indonesia di antara SAI negara anggota ASEAN dengan memanfaatkan momen serah terima jabatan keketuaan dan diskusi agenda strategis organisasi. Melalui perannya sebagai Sekretariat ASEANSI, BPK berkontribusi dalam memfasilitasi koordinasi regional, mempererat hubungan antaranggota dan mitra, serta mendukung kesinambungan kerja sama ASEANSI
- i. Selain itu, sepanjang tahun 2025, BPK selaku Sekretariat ASEANSI berperan aktif dalam menginisiasi dan memfasilitasi pertemuan antar-komite ASEANSI guna membahas rencana implementasi *work plan* tahun 2025 serta mengidentifikasi dan menindaklanjuti isu-isu strategis organisasi. Dalam rangka memperkuat keberlanjutan pelaksanaan program, BPK juga menyelenggarakan pertemuan dengan mitra potensial, antara lain *Canadian Audit and Accountability Foundation* (CAAF) dan *INTOSAI Development Initiative* (IDI), untuk menjajaki peluang kerja sama. Selain itu, BPK melakukan serangkaian pertemuan koordinasi dengan SAI Swedia guna membahas dukungan terhadap implementasi kegiatan ASEANSI tahun 2025, khususnya dalam penguatan kapasitas di berbagai bidang, antara lain manajemen proyek, pengembangan strategi komunikasi, penguatan kerja sama dengan *development partners*, serta promosi produk dan inisiatif ASEANSI di tingkat regional dan internasional, sekaligus mendukung pengembangan kapasitas BPK dalam menjalankan perannya sebagai Sekretariat ASEANSI. Pada akhir tahun 2025, *Steering Committee Meeting* diselenggarakan antara BPK dan SAI Swedia untuk mengevaluasi implementasi kegiatan 2025 dan mendiskusikan rencana kegiatan 2026.

Melalui peran BPK sebagai Sekretariat ASEANSI, pengembangan jaringan dan kemitraan dengan berbagai regional dan global dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Keterlibatan aktif BPK dalam berbagai forum strategis ASEAN dan ASEANSI sepanjang tahun 2025 menunjukkan kontribusi nyata Indonesia dalam memperkuat posisi ASEANSI sebagai platform kerja sama antar lembaga pemeriksa di kawasan. Peran ini tidak hanya memperluas jejaring profesional dan kelembagaan, tetapi juga membuka peluang kolaborasi strategis di bidang pemeriksaan sektor publik, penguatan tata kelola, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Kontribusi BPK sebagai Sekretariat ASEANSI turut memperkuat kapasitas kelembagaan Indonesia dalam mendukung kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, khususnya melalui promosi praktik pemeriksaan yang sejalan dengan standar internasional dan penguatan kemitraan pembangunan. Pada saat yang sama, peran aktif Indonesia dalam

ASEANSAI memberikan manfaat kolektif bagi negara-negara anggota ASEAN dengan meningkatkan eksposur dan visibilitas kawasan di forum regional dan internasional. Melalui kolaborasi yang solid dalam kerangka ASEANSAI, lembaga pemeriksa negara anggota dapat saling memperkuat kapasitas dan peran strategisnya, sehingga ASEAN semakin diakui sebagai kawasan yang menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat global.

1.2. Fungsi Peningkatan Kapasitas dan Pertukaran Pengetahuan

Keanggotaan BPK dalam ASEANSAI memberikan manfaat strategis dalam peningkatan kapasitas dan pertukaran pengetahuan di bidang pemeriksaan sektor publik dan tata kelola pemerintahan. Melalui berbagai program dan forum ASEANSAI, BPK memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kompetensi pemeriksa sekaligus memperkaya wawasan melalui berbagi pengalaman dan praktik terbaik antar lembaga pemeriksa negara anggota ASEAN.

Pelaksanaan fungsi ini difasilitasi terutama melalui ASEANSAI *Knowledge Sharing Committee* (KSC) dan *Training Committee* (TC) sebagai wadah utama pengembangan kapasitas dan diseminasi pengetahuan. Selain itu, fungsi peningkatan kapasitas dan pembelajaran organisasi juga diperkuat melalui peran *Strategic Planning Committee* (SPC) yang memastikan keselarasan arah strategis, rencana kerja, serta kerangka monitoring dan evaluasi ASEANSAI dengan kebutuhan pengembangan kapasitas di tingkat regional. Keterlibatan BPK dalam ketiga komite tersebut memberikan nilai tambah keanggotaan dalam bentuk penguatan kapasitas individu dan kelembagaan, sekaligus mendukung kontribusi Indonesia terhadap pengembangan praktik pemeriksaan yang profesional, transparan, dan akuntabel di kawasan ASEAN.

1) *Knowledge Sharing Committee*

Knowledge Sharing Committee (KSC) berfungsi sebagai wadah utama pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar lembaga pemeriksa negara anggota ASEANSAI. Melalui diseminasi praktik terbaik, pembelajaran bersama, dan berbagi pengalaman di bidang pemeriksaan sektor publik serta tata kelola pemerintahan, komite ini mendorong peningkatan kapasitas kolektif negara anggota dalam menerapkan prinsip pengawasan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Dalam mendukung pelaksanaan fungsi tersebut, BPK berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan *knowledge sharing* ASEANSAI, termasuk berkontribusi sebagai narasumber serta menjalankan peran sebagai *project leader (Knowledge Sharing Expert)* pada kegiatan tertentu dalam *work plan* KSC, sehingga turut memperkuat pembelajaran bersama di tingkat regional dan peningkatan kapasitas kelembagaan BPK.

- a. BPK berpartisipasi dalam *Inaugural ASEAN Auditor Conference 2025* pada 27 Mei 2025, sebagai forum strategis untuk memperkuat jejaring dan kolaborasi antar pemeriksa di kawasan ASEAN dalam mendorong sistem audit yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam sesi *High-Level Dialogue*, BPK memaparkan praktik dan pengalaman terkait pemanfaatan Sistem Informasi Pemeriksaan Tindak Lanjut (SIPTL) sebagai upaya mendorong transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan publik, sekaligus menegaskan komitmen BPK terhadap integrasi teknologi dalam sistem pengawasan.

Selain itu, momentum ini dimanfaatkan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah lembaga pemeriksa negara, termasuk SAI Malaysia dan SAI Uni Emirat

Arab, guna membahas peluang kerja sama strategis, antara lain penjajakan penunjukan lembaga pemeriksa anggota ASEANSAI sebagai auditor eksternal ASEAN serta finalisasi kerja sama kelembagaan melalui nota kesepahaman. Keterlibatan ini memperkuat posisi Indonesia dalam komunitas pemeriksaan regional serta mendukung pengembangan kerja sama pemeriksaan yang inovatif dan akuntabel di tingkat ASEAN.

- b. ASEANSAI *Knowledge Sharing Workshop on Public Debt Audit* diselenggarakan pada 26-28 Agustus 2025 sebagai upaya mendorong peningkatan kapasitas pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas utang publik yang selaras dengan International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 100 dan INTOSAI GUID 5250. Workshop ini membahas kompleksitas pengelolaan utang publik, pentingnya transparansi dan akuntabilitas fiskal, serta perlindungan hak asasi manusia dalam tata kelola fiskal. Materi yang disampaikan mencakup pendekatan audit keuangan, audit kinerja, dan audit kepatuhan, termasuk pemanfaatan analisis data dan penilaian risiko fiskal sebagai praktik pemeriksaan yang inovatif.

Dalam kegiatan ini, BPK berpartisipasi sebagai peserta melalui penyusunan *country paper* dan penyampaian presentasi, sekaligus menjalankan peran sebagai anggota *Training Committee* dan Sekretariat ASEANSAI. Melalui keterlibatan tersebut, BPK mendorong penguatan kerja sama dan pertukaran pengetahuan antar lembaga pemeriksa negara anggota, yang ditindaklanjuti melalui *wrap up meeting* dengan SAI Malaysia, SAI Filipina, dan SAI Swedia. Pertemuan ini dimanfaatkan untuk mengidentifikasi peluang kolaborasi lanjutan dan merumuskan rencana tindak lanjut dalam pengembangan kapasitas pemeriksaan utang publik di tingkat regional.

- c. BPK berpartisipasi dalam ASEANSAI *Young Leaders Programme* (YLP) 2025 pada 13 November 2025 sebagai rangkaian *8th ASEANSAI Summit*. Program ini dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan pemeriksa muda di kawasan ASEAN melalui pertukaran pengetahuan, pembelajaran atas inovasi audit, serta pengembangan jejaring profesional lintas lembaga pemeriksa dengan tema *Building for the Future*, yang menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi, big data, kecerdasan buatan, serta pengembangan kepemimpinan generasi muda auditor. Melalui partisipasi tersebut, BPK memperoleh kesempatan untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran terkait transformasi digital dalam pemeriksaan, khususnya pemanfaatan *Big Data Analytics* melalui *BPK Integrated Data and Information Center System* (BIDICS) dan *Interactive Data Analytic Center* (iDANCE), sekaligus bertukar pengetahuan mengenai praktik inovatif, penguatan kapasitas, mekanisme tindak lanjut rekomendasi, serta fokus audit pada area berisiko tinggi.
- d. BPK berpartisipasi dalam kegiatan ASEANSAI *KSC Cooperative Research* bertema *SAIs in ASEAN and Moving Forward to Digital Organisation* yang dilaksanakan sebagai riset kolaboratif yang dipimpin oleh SAI Thailand dengan melibatkan beberapa lembaga pemeriksa negara anggota. Kegiatan ini dilaksanakan melalui survei, wawancara, analisis konseptual, serta *workshop* pada 15 - 17 Desember 2025, dengan tujuan mendukung pengembangan organisasi lembaga pemeriksa di kawasan ASEAN menuju transformasi digital yang berkelanjutan. *Workshop* difokuskan pada pengujian kerangka *Trend Objective Tool* dan *Insight Trio* melalui pendekatan *sandbox* dan simulasi studi kasus dengan tema *digital readiness* dan *digital resilience*. Melalui kegiatan ini, BPK berkontribusi dalam diskusi dan pertukaran pengetahuan terkait transformasi digital sekaligus memperoleh pembelajaran praktis mengenai penguatan ketahanan sistem digital dan keandalan

fungsi pemeriksaan. Hasil kegiatan ini menghasilkan pembelajaran bersama berupa identifikasi faktor kunci keberhasilan, langkah tindak lanjut operasional, serta isu dan risiko strategis yang menjadi dasar penyempurnaan *research paper*.

2) *Training Committee*

Training Committee (TC) bertanggung jawab dalam merancang dan mengoordinasikan program pelatihan ASEANSAI guna meningkatkan kapasitas teknis dan profesional pemeriksa negara anggota. Program pelatihan ini ditujukan untuk memastikan kompetensi pemeriksa tetap relevan dan mutakhir dalam menghadapi perkembangan dan tantangan pemeriksaan sektor publik, serta selaras dengan standar pemeriksaan internasional.

Dalam pelaksanaan program TC, BPK berperan aktif sebagai peserta, narasumber, maupun penyelenggara kegiatan pelatihan, yang mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia pemeriksa serta memperluas jejaring profesional BPK di tingkat regional.

- a. BPK berpartisipasi dalam ASEANSAI *Learning Session on ISSAI 140 – Quality Management for SAIs: An Overview* secara daring pada 12 Agustus 2025. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman lembaga pemeriksa anggota ASEANSAI mengenai penerapan ISSAI 140 yang menekankan pendekatan manajemen mutu audit yang sistemik, berbasis risiko, dan berkelanjutan. Melalui paparan materi dan diskusi interaktif, kegiatan ini meningkatkan kesadaran akan pentingnya penerapan sistem manajemen mutu audit serta mengidentifikasi kebutuhan penguatan kapasitas lanjutan guna mendukung implementasi standar baru di masing-masing lembaga pemeriksa.
- b. BPK menjadi tuan rumah penyelenggaraan ASEANSAI *Workshop on Strengthening Budget Credibility through External Audits* pada 16 - 19 September 2025. *Workshop* ini dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas pemeriksa negara anggota ASEANSAI dalam menilai kredibilitas anggaran negara melalui pemeriksaan eksternal, dengan fokus pada peran audit dalam mendukung disiplin fiskal, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Kegiatan ini melibatkan pemangku kepentingan dari Kementerian Keuangan dan organisasi internasional, antara lain International Foundation for Electoral Systems (IFES), International Budget Partnership (IBP), ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre), ASEAN Parties Against Corruption (ASEAN PAC), dan ASEAN Centre for Energy (ACE). Sesi pembelajaran difasilitasi oleh perwakilan SAI Filipina, SAI Malaysia, dan BPK, melalui diskusi panel, studi kasus, serta berbagi praktik terbaik. Partisipasi BPK sebagai tuan rumah, pembicara dan peserta memperkuat kontribusi Indonesia dalam pengembangan kapasitas pemeriksaan anggaran di tingkat regional, sekaligus memperluas jejaring kerja sama lintas lembaga di kawasan ASEAN.

- c. Pada tahun 2025, ASEANSAI *Training Committee* (TC) memfokuskan kegiatannya pada pengembangan ASEANSAI *Competency Framework dan Competency Based Learning and Development Framework* (ASEANSAI CBL&D) sebagai rujukan peningkatan kapasitas lembaga pemeriksa negara anggota. Kerangka ini mendukung proses rekrutmen, pengembangan, dan evaluasi kompetensi auditor sesuai ISSAI 150, serta standar nasional masing-masing SAI. Keterlibatan BPK dalam TC memungkinkan kontribusi aktif dalam perumusan kerangka tersebut sekaligus

memberikan manfaat berupa penguatan pengelolaan sumber daya manusia dan pengembangan auditor sektor publik di lingkungan BPK.

Untuk mendukung implementasinya, TC mengembangkan ASEANSAI CBL&D Framework yang mendorong pergeseran dari pendekatan pelatihan menuju pembelajaran dan pengembangan yang lebih menyeluruh, mencakup pembelajaran formal, berbasis pengalaman, dan interaksi sosial, sejalan dengan INTOSAI GUID 1951. Selain itu, TC menyusun ASEANSAI *Coaching and Mentoring Strategy* sebagai panduan pembinaan profesional auditor melalui mekanisme coaching dan mentoring yang terstruktur dan berkelanjutan. Keterlibatan BPK dalam inisiatif ini memperkuat kapasitas kelembagaan, pembelajaran strategis, serta pengembangan kepemimpinan dan profesionalisme pegawai BPK secara berkesinambungan.

3) *Strategic Planning Committee*

Strategic Planning Committee (SPC) berfungsi mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan ASEANSAI melalui perumusan arah strategis, rencana kerja, serta pengembangan kerangka monitoring dan evaluasi organisasi. Melalui peran ini, SPC memastikan bahwa program ASEANSAI, termasuk peningkatan kapasitas dan pertukaran pengetahuan, dilaksanakan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Sebagai anggota SPC, BPK berkontribusi dalam proses perencanaan dan pembelajaran strategis organisasi, yang memperkuat kapasitas kelembagaan serta pemahaman BPK terhadap tata kelola organisasi regional dan pengelolaan program berbasis hasil.

- a. Pada tahun 2025, ASEANSAI *Strategic Planning Committee* (SPC) memfokuskan pada penyusunan dan finalisasi Rencana Strategis ASEANSAI 2026–2029 sebagai arah kebijakan organisasi pada periode mendatang. Pembahasan difokuskan pada penyelarasan visi, tujuan strategis, dan *Implementation Matrix* agar relevan, terukur, dan adaptif terhadap dinamika pemeriksaan sektor publik. Dalam proses tersebut, BPK berperan aktif sebagai anggota SPC dan Sekretariat ASEANSAI dengan mendorong perumusan indikator kinerja serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang akuntabel. Rencana Strategis ASEANSAI 2026–2029 memuat empat tujuan strategis utama disahkan pada ASEANSAI *Summit* 2025, sekaligus menegaskan peran SPC pada tahun 2025 sebagai penggerak utama perumusan arah jangka menengah ASEANSAI.
- b. ASEANSAI *Annual Monitoring and Evaluation Meeting* (AMEM) diselenggarakan secara daring pada 16 Oktober 2025 yang bertujuan mengevaluasi kinerja Komite dan Sekretariat ASEANSAI selama tahun 2025, mengidentifikasi tantangan serta pembelajaran utama, serta membahas penyusunan ASEANSAI *Annual Results Report* 2025 sebagai dasar pengambilan keputusan dan kesinambungan implementasi *Strategic Plan* 2026–2029.

Dalam pertemuan ini, BPK berperan sebagai anggota *Strategic Planning Committee* dan sebagai Sekretariat ASEANSAI dalam memfasilitasi pemaparan capaian kinerja, dan pembahasan tantangan. Pembahasan difokuskan pada penguatan kerja sama eksternal dan tata kelola internal organisasi, yang menghasilkan finalisasi *Annual Results Report* 2025.

1.3. Fungsi Lainnya

Selain manfaat dalam pengembangan jejaring internasional dan peningkatan kapasitas, keanggotaan Indonesia dalam ASEANSAI juga memberikan manfaat kualitatif lainnya berupa peningkatan kepercayaan dan pengakuan terhadap peran strategis BPK di tingkat regional dan internasional. Kepercayaan tersebut tercermin dalam terbukanya peluang kerja sama strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan organisasi BPK sekaligus memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam komunitas lembaga pemeriksa dunia.

Salah satu wujud konkret dari manfaat tersebut adalah dukungan negara anggota ASEANSAI pada saat pencalonan Indonesia sebagai Ketua INTOSAI periode 2028 sampai dengan 2031. Hubungan kerja sama yang terbangun secara konsisten di kawasan ASEAN juga berkontribusi positif dalam keberhasilan Indonesia memperoleh dukungan pada berbagai proses pencalonan sebagai pemeriksa eksternal organisasi internasional. Selain itu, peran aktif Indonesia di forum ASEANSAI turut membuka peluang kerja sama strategis lainnya, baik dengan lembaga donor maupun dengan lembaga pemeriksa negara lain, yang mendukung penguatan posisi BPK serta kontribusi Indonesia dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat global.

2. MANFAAT KUANTITATIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional, manfaat kuantitatif mencakup antara lain jumlah dan atau nilai kerja sama teknik, tingkat partisipasi dalam kegiatan internasional, jumlah dan atau nilai bantuan dan program pembangunan, serta keterlibatan warga negara Indonesia dalam organisasi internasional.

Sejalan dengan manfaat kualitatif yang diperoleh melalui penguatan hubungan, peningkatan kapasitas, dan peluang kerja sama strategis sebagaimana diuraikan pada Bagian 1, sepanjang tahun 2025 BPK juga memperoleh manfaat kuantitatif melalui pelaksanaan dan inisiasi sejumlah kerja sama teknik dalam kerangka pengembangan ASEANSAI. Kerja sama teknik yang menonjol pada tahun 2025 adalah kerja sama antara BPK selaku Sekretariat ASEANSAI dengan SAI Swedia, yang diwujudkan dalam bentuk asistensi teknis terkait penguatan kapasitas pemeriksa dan peningkatan kapasitas BPK dalam menjalankan peran sebagai Sekretariat ASEANSAI

Selain itu, telah dilakukan inisiasi peninjauan kerja sama dengan Canadian Audit and Accountability Foundation (CAAF) melalui penyusunan proposal pengembangan kapasitas regional kepada Global Affairs Canada dalam skema Indo-Pacific Regional Connectivity Envelope, dengan estimasi nilai pendanaan sekitar USD 200.000 untuk periode 2026–2028. Inisiatif ini mencerminkan manfaat kuantitatif keanggotaan ASEANSAI berupa peluang pendanaan internasional, perluasan cakupan program pengembangan kapasitas, serta penguatan dukungan eksternal terhadap peran BPK sebagai Sekretariat ASEANSAI.

2.1 Kerja Sama Teknik

Pada tahun 2025, ASEANSAI melaksanakan kerja sama teknik bilateral dengan SAI Swedia dalam kerangka kerja sama periode 2024–2029 yang mencakup tiga komponen utama, yaitu penguatan *Training Committee* dan *Knowledge Sharing Committee*, dukungan terhadap *Strategic Planning Committee*, serta penguatan fungsi Sekretariat ASEANSAI. Ruang lingkup kerja sama meliputi asistensi teknis dan dukungan *subject matter expert*

dalam pengembangan kapasitas regional, penyusunan dan pemantauan Rencana Strategis ASEANSI 2026–2029, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, serta peningkatan tata kelola internal, manajemen organisasi, dan kesiapan Sekretariat dalam menjalin kemitraan dengan donor. Melalui kerja sama ini, BPK selaku Sekretariat ASEANSI memperoleh peningkatan kapasitas kelembagaan yang terukur dalam pengelolaan organisasi internasional dan pelaksanaan program berbasis hasil, sekaligus meletakkan fondasi dukungan teknis jangka menengah bagi keberlanjutan pelaksanaan mandat ASEANSI di tingkat regional.

Rincian pelaksanaan kerja sama teknik Internasional adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Kerja Sama Teknik

No.	Kegiatan	Tujuan	Tanggal	Media/ tempat
1.	<i>Training for ASEANSI Secretariat to Strengthen Its Secretariat Function</i> (ASEANSI - Swedish NAO Brainstorming Workshop)	Memperkuat kapasitas dan efektivitas Sekretariat ASEANSI melalui peningkatan tata kelola dan kerja sama internasional.	22-25 April	Stockholm, Swedia
2.	Penyusunan Rencana Strategis ASEANSI 2026 - 2029	Menetapkan arah dan prioritas strategis ASEANSI periode 2026–2029.	sepanjang 2025	Daring
3.	<i>Knowledge Sharing Workshop on Public Debt Audit</i>	Meningkatkan kapasitas pemeriksaan utang publik melalui pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik antar lembaga pemeriksa di ASEAN.	26-28 Agustus	hybrid

2.2 Partisipasi Kegiatan Internasional

Selain memperoleh manfaat kuantitatif melalui pelaksanaan kerja sama teknis sebagaimana diuraikan pada Subbagian 2.1, Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan ASEANSI sepanjang tahun 2025. Partisipasi tersebut dilaksanakan baik dalam kapasitas BPK sebagai Sekretariat ASEANSI maupun sebagai lembaga pemeriksa negara anggota, sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam mendukung penguatan kerja sama regional di bidang pemeriksaan sektor publik.

Partisipasi BPK dalam kegiatan ASEANSI memberikan manfaat kualitatif berupa penguatan jejaring kerja sama, peningkatan kepercayaan antar lembaga pemeriksa negara anggota, serta terbukanya peluang kerja sama strategis yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kerja sama teknis dan program pengembangan kapasitas pada periode berikutnya. Dengan demikian, partisipasi aktif Indonesia berperan sebagai sarana pendukung pencapaian manfaat kuantitatif keanggotaan, sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di kawasan ASEAN.

Rincian partisipasi Indonesia dalam kegiatan ASEANSI sepanjang tahun 2025 disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2. Perancangan Program Pelatihan atau Riset Internasional

No.	Kegiatan	Tanggal	Media/ tempat
1.	<i>Training for ASEANSAT Secretariat to Strengthen Its Secretariat Function (ASEANSAT - Swedish NAO Brainstorming Workshop)</i>	22-25 April	Stockholm, Swedia
2.	<i>Virtual Learning Session on the Revised ISSAI 140 - Quality Management for SAIs</i>	12 Agustus	Daring
3.	Penyusunan: a. ASEANSAT Competency Framework b. ASEANSAT Competency Based Learning and Development Framework c. ASEANSAT Coaching and Mentoring Strategy	2025	Daring
4.	Penyusunan Rencana Strategis ASEANSAT 2026 - 2029	2025	Daring
5.	ASEANSAT KSC 2025 Research Project: "Cooperative Research on SAIs in ASEAN and Moving Forward to a Digital Organization"	15-17 Desember	Ayutthaya, Thailand

Tabel 3. Partisipasi Kegiatan Internasional - ASEANSAT

No.	Kegiatan	Tanggal	Manfaat	Lokasi
1	<i>Visit on the Chair of BPK to Auditor-Generals's Office of Singapore</i>	4 Februari	BPK dapat memperoleh sharing pengalaman dari SAI Singapura terkait public procurement/e-procurement audits dan bertukar pengetahuan terkait Knowledge Management Framework	Singapura
2	<i>Planning Meeting for the Preparation of the ASEANSAT Workshop on Public Debt</i>	7 Februari	Perencanaan agenda, memastikan relevansi topik dengan kepentingan audit publik, serta memperkuat kolaborasi dengan SAI anggota ASEANSAT dalam pengawasan dan tata kelola utang publik	Daring
3	<i>Coordination Meeting for the Preparation of the 8th ASEANSAT Senior Officials' Meeting</i>	11 Februari	Memastikan perencanaan, mengoordinasikan agenda dan logistik dengan tuan rumah, serta mendukung kelancaran pelaksanaan pertemuan sesuai dengan tujuan strategis ASEANSAT.	Daring
4	<i>Planning Meeting ASEANSAT - Swedish NAO to Support the ASEANSAT Secretariat</i>	3 Maret	Koordinasi dan persiapan penguatan kapasitas Sekretariat ASEANSAT melalui pemetaan dan pengembangan proses kerja, serta mempererat kerja sama internasional dalam mendukung efektivitas operasional ASEANSAT.	Daring
5	<i>ASEANSAT Executive Committee Technical Level Meeting</i>	10 April	Memperkuat kapasitas Sekretariat ASEANSAT dalam tata kelola kesekretariatan, dengan fokus pada pemetaan tanggung jawab dan proses kerja serta pengenalan pengelolaan sekretariat organisasi pemeriksa internasional.	Daring

No.	Kegiatan	Tanggal	Manfaat	Lokasi
7	<i>ASEAN Cybersecurity Training Level 1 for IT Professionals</i>	19 - 23 Mei	Memperkuat kapasitas keamanan siber, mendukung transformasi digital yang aman, serta memperluas jejaring dan adopsi praktik terbaik regional di bidang teknologi informasi.	ASEAN Sekretariat, Jakarta
8	<i>ASEANSAI High-Level Dialogue on Issues and Challenges in Public Sector Auditing</i>	27 - 28 Mei	BPK dapat membagikan pengalaman sebagai pemeriksa dalam peningkatan audit sektor publik melalui tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	Kuala Lumpur
9	<i>50th ASEAN Audit Committee (AAC) Meeting</i>	13 Juni	Turut berkontribusi dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik di Sekretariat ASEAN, serta memperkuat kolaborasi dengan organisasi terkait untuk peningkatan kapasitas di bidang pemeriksaan sektor publik.	ASEAN Sekretariat, Jakarta
10	<i>9th Forum of Entities Associated with ASEAN</i>	18 Juni	Memperkuat kolaborasi, memperluas jejaring, dan memastikan kontribusi ASEANSAI selaras dengan agenda dan prioritas ASEAN.	ASEAN Sekretariat, Jakarta
11	<i>8th ASEANSAI Senior Officials' Meeting</i>	9 - 11 Juli	BPK sebagai Sekretariat berkesempatan memberikan masukan atas kegiatan strategis ASEANSAI	Manila, Filipina
12	<i>Coordination Meeting on the Preparation of the ASEANSAI Training Committee on Budget Credibility</i>	17 Juli	Memperkuat peran BPK (tuan rumah dan pemateri) dalam ASEANSAI TC Workshop, serta meningkatkan visibilitas BPK di tingkat regional.	Daring
13	<i>58th ASEAN Day: Towards Inclusive & Sustainable ASEAN Future</i>	8 Agustus	Memperkuat visibilitas dan hubungan kelembagaan tingkat kawasan, mempromosikan peran transparansi dan akuntabilitas, serta membuka peluang kolaborasi strategis dengan negara anggota dan mitra pembangunan	ASEAN Sekretariat
14	<i>ASEANSAI Technical Level Executive Committee Meeting</i>	14 Agustus	Memperkuat peran sebagai Sekretariat ASEANSAI dengan memastikan tindak lanjut hasil SOM, koordinasi persiapan 8 th ASEANSAI Summit, serta proses penerimaan SAI Timor-Leste berjalan lancar dan tepat waktu.	Daring
15	<i>17th ASEAN Coordinating Conference for the ASEAN Political-Security Community (17th ASCCO)</i>	22 Agustus	Mempererat hubungan kelembagaan dengan ASEAN dan mitra terkait, menyampaikan kontribusi ASEANSAI dengan agenda APSC, sekaligus memperkuat relasi dengan entitas ASEAN lainnya.	ASEAN Sekretariat
16	<i>ASEANSAI Knowledge Sharing Workshop on Public Debt</i>	26-28 Agustus	Memperkuat peran BPK dalam memperluas jaringan kerja sama internasional dan meningkatkan kapasitas profesional di bidang audit utang pemerintah	Manila, Filipina

No.	Kegiatan	Tanggal	Manfaat	Lokasi
17	<i>Coordination Meeting on Possible Cooperation between ASEANSI and the Canadian Audit and Accountability Foundation (CAAF)</i>	3 September	Menjajaki peluang kemitraan strategis dan dukungan pendanaan dalam rangka memperkuat program <i>capacity building</i> , pelatihan, serta tata kelola ASEANSI.	Daring
18	<i>ASEANSI Workshop on Strengthening Budget Credibility through External Audits</i>	16-19 September	Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dalam menilai kredibilitas anggaran, memperkuat rekomendasi berbasis temuan, dan memperluas pertukaran praktik terbaik antar anggota ASEANSI	Jakarta
19	<i>ASEANSI Annual Monitoring & Evaluation Meeting</i>	16 Oktober	Memperkuat peran BPK dalam memantau capaian rencana strategis, meningkatkan kualitas koordinasi dan pelaporan kinerja ASEANSI, serta memastikan kontribusi BPK selaras dengan arah kebijakan organisasi.	Daring
20	<i>ASEANSI Steering Committee Meeting</i>	11 November	Manfaat dalam bidang administrasi publik melalui penguatan koordinasi dengan mitra pembangunan, penyelarasan prioritas program, serta dukungan terhadap pengembangan kapasitas dan tata kelola ASEANSI	Singapura
21	<i>ASEANSI Development-Partners Coordination Meeting</i>	12 November	Manfaat dalam bidang manajemen strategis dan kebijakan publik melalui keterlibatan dalam evaluasi kinerja, pengawasan implementasi program, serta penetapan arah strategis kerja sama ASEANSI	Singapura
22	<i>8th ASEANSI Summit</i>	12 - 14 November	Memperkuat peran BPK sebagai Supreme Audit Institution (SAI) di tingkat regional	Singapura
23	<i>ASEANSI Young Leaders' Programme (YLP)</i>	13 November	Peningkatan kapasitas para pemeriksa muda melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman, pemahaman terhadap inovasi serta prioritas terkini dalam audit sektor publik, serta memperkuat jaringan profesional di kawasan ASEAN.	Singapura

2.3 Jumlah dan/atau Nilai Bantuan

Selain manfaat kuantitatif berupa kerja sama teknis dan partisipasi dalam kegiatan internasional sebagaimana diuraikan di atas, keanggotaan Indonesia dalam ASEANSI juga memberikan manfaat kuantitatif dalam bentuk bantuan pendanaan dan dukungan fasilitas dari mitra internasional untuk mendukung pelaksanaan program dan penguatan kapasitas organisasi.

Dalam hal ini, pada tahun 2018 BPK sebagai Sekretariat ASEANSI memperoleh *trust fund* dari World Bank sebesar USD 325.000 untuk mendukung program implementasi ISSAI di kawasan ASEAN. Selanjutnya, melalui kerja sama dengan Pemerintah Jerman yang dilaksanakan bersama Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), BPK menerima hibah peralatan kantor senilai USD 17.300 yang digunakan oleh Sekretariat ASEANSI hingga tahun 2025. Pada tahun 2025 BPK sebagai anggota ASEANSI

memperoleh dukungan pembiayaan dari Pemerintah Cina untuk berpartisipasi dalam *Seminar for Young Auditors from ASEAN Countries* yang mencakup biaya perjalanan, akomodasi, dan transportasi lokal, sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, BPK sebagai ASEANSI Sekretariat memperoleh dukungan pembiayaan dari SAI Swedia untuk berpartisipasi dalam *Training for ASEANSI Secretariat to Strengthen Its Secretariat Function* (ASEANSI - Swedish NAO Brainstorming Workshop) yang mencakup biaya perjalanan, akomodasi, dan transportasi lokal untuk penguatan kapasitas Sekretariat ASEANSI.

2.4 Jumlah Warga Negara Indonesia yang bekerja pada Organisasi Internasional

Sekretariat ASEANSI berkedudukan di Indonesia dan dikelola sepenuhnya oleh BPK, dengan penugasan pegawai BPK untuk mengoperasionalkan Sekretariat ASEANSI di samping pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan sebagai pegawai BPK. Penugasan ini mencerminkan kontribusi sumber daya manusia Indonesia dalam mendukung operasional organisasi internasional di tingkat regional.

Selain keterlibatan langsung pegawai BPK, keberadaan Sekretariat ASEANSI di Indonesia juga membuka peluang partisipasi warga negara Indonesia lainnya, antara lain pakar, akademisi, praktisi, dan organisasi nasional, sebagai narasumber dalam kegiatan pelatihan dan riset ASEANSI yang diselenggarakan di Indonesia. Keterlibatan tersebut berkontribusi pada penguatan muatan substantif pembahasan, perluasan jejaring profesional, serta potensi manfaat ekonomi dan kerja sama pelatihan maupun riset, sejalan dengan karakter ASEANSI sebagai organisasi kerja sama berbasis pengetahuan dan pengembangan kapasitas.

3. UPAYA MENEKAN KONTRIBUSI

Dalam mengelola kontribusi keanggotaan Indonesia pada forum ASEANSI, BPK berupaya mengoptimalkan manfaat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional serta Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019. Ketentuan tersebut menjadi landasan dalam memastikan bahwa partisipasi Indonesia dalam kerja sama internasional dilaksanakan secara akuntabel, terukur, dan sejalan dengan kebijakan nasional.

Selain mempedomani ketentuan regulasi, BPK juga melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri untuk memperoleh masukan serta evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan kerja sama internasional. Dalam pelaksanaannya, BPK turut memperhatikan kebijakan terkini, termasuk Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Nomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 tentang Kebijakan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, sebagai bagian dari upaya pengendalian dan efisiensi pelaksanaan kegiatan internasional.

Upaya menekan kontribusi Indonesia tidak semata-mata dilakukan melalui pengurangan anggaran, mengingat kontribusi keanggotaan ASEANSI relatif ekonomis dan Indonesia merupakan salah satu inisiator pendirian ASEANSI. Oleh karena itu, peran aktif Indonesia dalam kegiatan ASEANSI tetap dipertahankan sebagai bagian dari komitmen dan kepemimpinan regional. Dalam konteks ini, BPK menempatkan efisiensi sebagai bagian dari pengelolaan strategis, dengan tetap menjaga kehadiran dan kontribusi Indonesia dalam forum-forum utama ASEANSI.

Sebagai alternatif pendekatan, BPK lebih menekankan pada optimalisasi nilai investasi keanggotaan melalui peningkatan peluang manfaat, sehingga rasio biaya dan manfaat mencerminkan penggunaan sumber daya yang produktif. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui optimalisasi peran BPK sebagai Sekretariat ASEANSI dalam pengelolaan anggaran organisasi, peninjauan dukungan pendanaan dan asistensi dari mitra pembangunan serta lembaga pemeriksa negara lain, serta mendorong kontribusi *in-kind* dari negara anggota dalam penyelenggaraan kegiatan ASEANSI. Selain itu, BPK juga mendorong perencanaan kegiatan yang lebih selektif dan terukur, termasuk penilaian atas efisiensi, efektivitas, dan signifikansi penyelenggaraan kegiatan secara daring maupun luring.

4. KINERJA OI YANG BERLOKASI DI INDONESIA

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berperan sebagai Sekretariat ASEANSI sejak organisasi tersebut didirikan pada tahun 2011. Pada ASEANSI *Summit* ke-7 tahun 2023, BPK kembali dipercaya untuk menjalankan fungsi Sekretariat ASEANSI untuk periode 2023–2029. Penempatan Sekretariat ASEANSI di Indonesia memberikan nilai strategis bagi Indonesia dalam memperkuat peran dan posisi di kawasan ASEAN serta dalam forum kerja sama pemeriksaan sektor publik di tingkat internasional.

Peran sebagai Sekretariat ASEANSI memberikan manfaat kualitatif dan kuantitatif yang signifikan, antara lain sebagai pengungkit kepemimpinan Indonesia di kawasan ASEAN dan kontribusi terhadap penguatan posisi Indonesia di tingkat global. Manfaat tersebut tercermin dalam meningkatnya kepercayaan internasional terhadap BPK dan Indonesia, termasuk dukungan terhadap pencalonan Indonesia sebagai Ketua INTOSAI periode 2028–2031 serta dalam berbagai proses pemilihan pemeriksa eksternal lembaga internasional. Keberadaan Sekretariat ASEANSI di Indonesia juga mendukung keterlibatan sumber daya manusia nasional dan pemanfaatan kerja sama teknis serta dukungan mitra pembangunan.

Dalam menjalankan fungsi Sekretariat, BPK bertanggung jawab mengoordinasikan kegiatan operasional ASEANSI, menyusun dan memfasilitasi agenda pertemuan, serta mengelola administrasi dan komunikasi antar negara anggota. BPK juga berperan dalam menjaga keberlanjutan kerja sama antar anggota ASEANSI dan dengan mitra eksternal, serta mendukung kinerja komite-komite ASEANSI dalam perancangan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pertukaran pengetahuan. Melalui peran tersebut, BPK berfungsi sebagai penggerak utama keberlangsungan organisasi ASEANSI dengan mengedepankan koordinasi yang efektif, fasilitasi kegiatan strategis, serta pengelolaan sistem pendukung organisasi, termasuk platform manajemen pengetahuan, secara efisien dan akuntabel.

a. Kontribusi *Inkind* Indonesia pada Sekretariat ASEANSI

Indonesia melalui Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan kontribusi *in-kind* dalam mendukung kinerja ASEANSI yang berlokasi di Indonesia. Kontribusi tersebut merupakan bagian integral dari pelaksanaan peran BPK sebagai Sekretariat ASEANSI dan berfungsi untuk memastikan kelancaran operasional organisasi, keberlanjutan program, serta efektivitas koordinasi antar lembaga pemeriksa negara anggota.

Sebagai tuan rumah Sekretariat ASEANSI, Pemerintah Indonesia melalui BPK memberikan berbagai bentuk kontribusi *in-kind* di luar kewajiban keanggotaan untuk mendukung kinerja dan keberlanjutan operasional ASEANSI, antara lain sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia
 - 1.1. Penugasan pegawai BPK RI untuk mendukung operasional Sekretariat ASEANSAI tanpa biaya tambahan bagi organisasi.
 - 1.2. Pelibatan staf pendukung untuk memastikan kelancaran administrasi dan logistik Sekretariat.
2. Pendanaan Kegiatan Tambahan
 - 2.1. Penyediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan fungsi Sekretariat ASEANSAI.
3. Kerja Sama dengan Mitra Internasional
 - 3.1. Memfasilitasi kolaborasi antara ASEANSAI dengan lembaga donor internasional melalui pendekatan yang strategis.

b. Manfaat Keberadaan Sekretariat ASEANSAI di Indonesia

Keberadaan Sekretariat ASEANSAI di Indonesia, yang dikelola oleh BPK memberikan manfaat strategis yang dapat dievaluasi secara kelembagaan, baik bagi Indonesia maupun bagi organisasi ASEANSAI secara keseluruhan. Manfaat tersebut merupakan hasil langsung dari peran operasional, koordinatif, dan fasilitatif BPK sebagai Sekretariat ASEANSAI.

1. Penguatan Peran dan Posisi Kelembagaan Indonesia

Keberadaan Sekretariat ASEANSAI di Indonesia memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama regional ASEAN di bidang pemeriksaan sektor publik. Melalui pelaksanaan fungsi Sekretariat, Indonesia berperan aktif dalam mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik di kawasan. Peran tersebut sekaligus mengukuhkan posisi strategis BPK RI dalam kerja sama internasional di bidang pemeriksaan sektor publik, yang tercermin dari meningkatnya kepercayaan dan pengakuan terhadap peran Indonesia di tingkat regional dan global
2. Pengembangan Kapasitas Nasional dan Regional

Pengelolaan Sekretariat ASEANSAI di Indonesia memberikan manfaat langsung bagi pengembangan kapasitas sumber daya manusia BPK RI melalui keterlibatan aktif pegawai dalam pengelolaan organisasi internasional, koordinasi program regional, serta fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas dan pertukaran pengetahuan. Selain itu, keberadaan Sekretariat juga memfasilitasi pertukaran pengalaman dan praktik terbaik antar lembaga pemeriksa negara anggota ASEANSAI, yang dapat dimanfaatkan oleh BPK RI untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pemeriksaan di tingkat nasional.
3. Fungsi Diplomasi Teknis dan Penguatan Hubungan Eksternal

Keberadaan Sekretariat ASEANSAI di Indonesia berfungsi sebagai sarana diplomasi teknis di bidang pemeriksaan sektor publik melalui interaksi rutin, koordinasi kelembagaan, dan kerja sama teknis dengan lembaga pemeriksa negara anggota ASEAN serta mitra eksternal. Fungsi ini turut membuka dan memperluas peluang kerja sama dengan mitra pembangunan internasional dalam mendukung penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pengembangan kapasitas kelembagaan di kawasan ASEAN.

5. PERAN PENTING BPK DALAM ORGANISASI ASEANSAI

Keanggotaan BPK dalam ASEANSAI memiliki makna strategis yang tercermin dari peran aktif BPK sejak pendirian organisasi. BPK merupakan salah satu inisiator pembentukan ASEANSAI, yang menunjukkan komitmen Indonesia dalam mendorong penguatan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik di kawasan ASEAN. Sejak awal, BPK berkontribusi dalam perumusan tujuan, struktur organisasi, dan mekanisme operasional ASEANSAI, serta menginisiasi kerja sama antar lembaga pemeriksa negara anggota. ASEANSAI juga telah diakui sebagai *associated entity* ASEAN, sehingga berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung pencapaian tujuan Komunitas ASEAN.

Peran Indonesia semakin diperkuat melalui penugasan BPK sebagai Sekretariat ASEANSAI sejak berdirinya organisasi dan kembali dipercaya untuk periode 2023–2029. Dalam kapasitas tersebut, BPK berfungsi sebagai penggerak utama pelaksanaan agenda ASEANSAI, termasuk koordinasi kegiatan, fasilitasi kerja sama antaranggota, serta pengembangan kemitraan dengan mitra pembangunan internasional. Peran Sekretariat ini sejalan dengan kinerja organisasi internasional yang berlokasi di Indonesia.

Selain menjalankan fungsi Sekretariat, BPK juga berperan aktif sebagai anggota dalam komite-komite ASEANSAI, yaitu *Strategic Planning Committee*, *Knowledge Sharing Committee*, dan *Training Committee*. Keterlibatan ini mencerminkan kontribusi substantif Indonesia dalam pengambilan keputusan strategis, pengembangan kapasitas, serta pertukaran pengetahuan di tingkat regional.

Sebagai anggota *Knowledge Sharing Committee*, BPK berkontribusi dalam memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik di bidang pemeriksaan sektor publik, termasuk pemanfaatan teknologi dan penguatan tata kelola. Dalam *Training Committee*, BPK berperan dalam perancangan dan pelaksanaan program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas teknis dan profesional pemeriksa anggota ASEANSAI. Sementara itu, melalui keterlibatan dalam *Strategic Planning Committee*, BPK turut berkontribusi dalam perumusan arah strategis jangka menengah ASEANSAI, pemantauan pelaksanaan program, serta evaluasi capaian organisasi agar selaras dengan tujuan dan mandat ASEANSAI.

Peran dalam beberapa komite organisasi ini menggambarkan peran Indonesia yang aktif dan penting dalam komunitas ASEANSAI. Melalui kerja sama yang erat, ASEANSAI tidak hanya menjadi platform berbagi pengetahuan dan pengalaman, tetapi juga instrumen penting untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi publik di tingkat regional dan internasional.

6. RENCANA KEGIATAN DALAM KEANGGOTAAN ASEANSAI 2026

Mengacu pada peran BPK sebagai Sekretariat ASEANSAI, fokus kegiatan Indonesia diarahkan pada penguatan implementasi Rencana Strategis ASEANSAI 2026–2029 dan penguatan fungsi inti organisasi. Kegiatan yang direncanakan mencerminkan kesinambungan peran Indonesia sebagai penggerak koordinasi, fasilitator pengembangan kapasitas, serta penjamin tata kelola organisasi ASEANSAI yang efektif dan berkelanjutan.

Prioritas pertama kegiatan tahun 2026 adalah penguatan kapasitas Sekretariat ASEANSAI dan tata kelola organisasi, yang tercermin dari penyelenggaraan dan partisipasi Indonesia dalam kegiatan pelatihan Sekretariat, pertemuan *Steering Committee*, serta *Annual Monitoring and Evaluation Meeting*. Kegiatan tersebut mendukung peningkatan kapasitas pengelolaan organisasi, implementasi sistem monitoring dan evaluasi, serta penguatan koordinasi antar komite ASEANSAI, sejalan dengan peran BPK sebagai Sekretariat ASEANSAI.

Prioritas kedua difokuskan pada pengembangan kapasitas dan profesionalisme pemeriksa negara anggota, melalui keterlibatan aktif Indonesia dalam berbagai program pelatihan, workshop teknis, dan kegiatan *Knowledge Sharing Committee* serta *Training Committee*. Agenda seperti *workshop* tematik pemeriksaan, penguatan pendekatan sistematis dalam audit, serta forum berbagi pengetahuan mencerminkan komitmen Indonesia dalam mendukung peningkatan kualitas pemeriksaan sektor publik dan pertukaran praktik terbaik di kawasan ASEAN.

Selain itu, kegiatan tahun 2026 juga diarahkan pada penguatan hubungan dan posisi ASEANSI dalam wilayah regional dan internasional, melalui partisipasi dalam forum tingkat tinggi, konferensi auditor ASEAN, serta kegiatan inovasi audit. Dalam konteks ini, Indonesia berperan aktif dalam memastikan keterkaitan program ASEANSI dengan agenda ASEAN yang lebih luas serta membuka peluang kerja sama dengan mitra pembangunan dan organisasi internasional.

Dengan demikian, fokus kegiatan Indonesia dalam ASEANSI pada tahun 2026 tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan agenda rutin organisasi, tetapi secara strategis diarahkan untuk memperkuat peran Indonesia sebagai Sekretariat ASEANSI, mendukung implementasi rencana strategis organisasi, meningkatkan kapasitas pemeriksaan sektor publik, serta mengoptimalkan manfaat keanggotaan Indonesia di tingkat regional dan internasional.

Secara umum, berikut agenda kegiatan ASEANSI yang sedianya akan diikuti oleh Indonesia pada tahun 2026.

Tabel 4. Rencana Partisipasi dalam Kegiatan ASEANSI Tahun 2026

No	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan	Virtual/ In-Person
1	ASEANSI Instructors' Design Meeting for the Course Design and Development (CDD) and Facilitation Skills to Create a Pool of Resource Persons/Subject Matter Experts.	13-17 April 2026	Filipina
2	Training for ASEANSI Secretariat to strengthen its Secretariat function (ASEANSI - Swedish NAO Development Workshop 2)	20-24 April 2026	Indonesia
3	ASEANSI Course Design and Development to Enhance Understanding of the Systematic Approach to Training	13-17 Juli	Filipina
4	5 th ASEANSI KSC Biennial Meeting	22-24 Juli	Siem Reap, Kamboja
6	ASEAN Auditor Conference 2026	Agustus	Malaysi
7	ASEANSI Facilitation Skills Workshops to Enhance Understanding of the Systematic Approach to Training	7-9 September	Kamboja
8	ASEANSI Knowledge Sharing Workshop on Bank Debt Audit	September	Lao PDR
9	ASEANSI Annual Monitoring and Evaluation Meeting	Oktober	TBD
10	ASEANSI - Swedish NAO Steering Committee Meeting	Oktober	Daring
11	ASEANSI Instructors' Design Meeting on setting up a System of Audit Quality Management (SoAQM)	16-20 November	Filipina
12	ASEANSI Workshop on Building Capacity For Future: Navigating Audits in The Face of Emerging Technologies	November	Malaysia
13	ASEANSI Audit Innovation Day 2026	November	Singapura

BAB III

SELF-ASSESSMENT

Self-assessment yang dilakukan oleh BPK atas keanggotaannya dalam ASEANSAI bertujuan untuk menilai sejauh mana kontribusi dan partisipasi BPK telah mendukung pencapaian tujuan organisasi, serta mengidentifikasi ruang perbaikan guna meningkatkan efektivitas keanggotaan ke depan. Hasil *self-assessment* ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian, tantangan, dan peluang yang dihadapi BPK dalam menjalankan perannya di ASEANSAI.

Keanggotaan BPK dalam ASEANSAI, serta partisipasi BPK dalam INTOSAI dan ASOSAI, diharapkan dapat mengoptimalkan perolehan manfaat kualitatif dan kuantitatif melalui pengembangan jejaring dan relasi internasional, peningkatan kapasitas dan pertukaran pengetahuan, serta pemanfaatan peluang kerja sama strategis.

Dalam pelaksanaannya, BPK memprioritaskan kegiatan peningkatan kapasitas pemeriksa melalui partisipasi dalam pelatihan dan workshop ASEANSAI, penguatan jaringan internasional melalui kerja sama dengan lembaga pemeriksa negara anggota dan mitra pembangunan, serta transfer pengetahuan yang dapat diimplementasikan dalam pemeriksaan domestik dan internasional. Peran aktif BPK dalam ASEANSAI juga berkontribusi pada penguatan pengakuan internasional terhadap kontribusi Indonesia dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dari sisi finansial, investasi Indonesia untuk keanggotaan ASEANSAI pada tahun 2025 tercatat sebesar USD 700 atau setara dengan Rp11.747.400,00 berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2025. Jika dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh, baik dalam bentuk peningkatan kapasitas, penguatan jejaring, maupun peluang kerja sama internasional, investasi tersebut dapat dinilai memberikan nilai tambah yang signifikan. Di luar pertimbangan finansial, Indonesia juga memiliki peran historis dan simbolis sebagai salah satu inisiator pendirian ASEANSAI dan negara tempat lahirnya organisasi, yang semakin memperkuat pentingnya kehadiran dan kontribusi Indonesia sebagai pilar utama keberlangsungan ASEANSAI.

Secara keseluruhan, hasil *self-assessment* menunjukkan bahwa keanggotaan BPK dalam ASEANSAI telah memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi Indonesia, baik dalam penguatan kapasitas pemeriksaan, pengembangan kerja sama regional dan internasional, maupun peningkatan peran Indonesia dalam diplomasi teknis di bidang pemeriksaan sektor publik. Keberadaan BPK sebagai Sekretariat ASEANSAI semakin memperkuat posisi Indonesia dalam komunitas internasional serta mencerminkan komitmen Indonesia dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

BAB IV

SARAN DAN KENDALA

Dengan peran BPK sebagai Sekretariat ASEANSI untuk periode 2024–2029, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung guna memastikan pelaksanaan fungsi Sekretariat berjalan efektif dan berkelanjutan. Penguatan tersebut mencakup aspek substansi, teknis pengelolaan kerja sama internasional, serta dukungan pendanaan yang memadai sejalan dengan meningkatnya kompleksitas dan ekspektasi terhadap peran Sekretariat ASEANSI.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi BPK sebagai Sekretariat ASEANSI adalah pengelolaan dinamika kerja sama lintas negara dengan latar belakang kebutuhan, prioritas, dan tingkat kapasitas yang beragam. Kondisi ini menuntut penguatan koordinasi, baik di tingkat nasional melalui sinergi antar kementerian dan lembaga terkait, maupun di tingkat regional melalui komunikasi dan kolaborasi yang efektif dengan lembaga pemeriksa negara anggota ASEAN serta organisasi regional lainnya.

Keterbatasan anggaran operasional juga menjadi tantangan dalam menginisiasi dan memperluas program-program ASEANSI yang memiliki dampak strategis. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat kemitraan dan menjajaki kerja sama dengan lembaga donor internasional serta mitra pembangunan guna mendukung pendanaan dan keberlanjutan program ASEANSI.

Selain aspek pendanaan, pengembangan inovasi program kerja menjadi kebutuhan penting agar kegiatan ASEANSI tetap relevan dengan tantangan pemeriksaan sektor publik yang terus berkembang. Inovasi tersebut mencakup penyusunan rencana kerja yang adaptif terhadap isu-isu strategis, antara lain transformasi digital, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemeriksaan, serta penguatan tata kelola pascapandemi, guna memastikan kontribusi ASEANSI tetap selaras dengan kebutuhan aktual negara anggota.